

Freddy, UU Unia 1995 di Sahkan, Selasa 19 Mei, <http://m.jpnn.com/news/uu-unia-1995>, diakses pada tanggal 13 agustus 2020.

Zona Ekonomi Eksklusif, <https://dislutkan.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2020/01/zee.pdf> di akses tanggal 12 agustus 2020.

Elisabeth Septin Puspoayu Cindy Yunita Sari. dan Virania Cahya Ramadhan, Praktik Illegal Transshipment di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut International, Elisabeth Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya. [file:///C:/Users/user/Downloads/35718-126462-1-PB%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/35718-126462-1-PB%20(4).pdf) di akses tanggal 12 agustus 2020

Hadi Maulana, Kompas.com. 2018, Bakamla akui kekurangan kapal patroli untuk amankan laut, <https://regional.kompas.com/read/2018/05/31/12092901/bakamla-akui-kekurangan-kapal-patroli-untuk-amankan-laut-ti>, diakses tanggal 28 Juni 2020.

Nathan Miller, *Pembelajaran mesin dan data sateli memberikan pandangan tentang aktivitas transshipment*, 2018, <https://skytruth.org/2018/07/machine-learning-and-satellite-data-provide-the-first-global-view-of-transshipment-activity/>, diakses tanggal 28 juni 2020.

Maritime Court, khusus penegakan hukum di laut, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5265b950a579/maritime-court-i--khusus-penegakan-hukum-di-laut>, diakses pada tanggal 28 juni 2020.

B. Peraturan Perundang – undangan

UNCLOS 1982 (Konvensi Hukum Laut International)

Undang – Undang No.17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United

Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa Tentang Hukum Laut)

Undang – Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57 Tahun 2014 tentang Larang Transhipment

C. Sumber Lain

Ridwan Lasabuda, 2013, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, Volume 1,2 Januari

Moh.Iqbal, 2012, *Illegal Fishing sebagai Kejahatan Korporasi*, volume 1,3 November

Salsabila, Aldhanalia Pramesti, 2018, “*Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transhipment di Indonesia*”, Lex Scientia Law Review, Volume 2 No. 1, Mei.

Elviana Roza, “Maritim Indonesia, Kemewahan yang Luar Biasa”, 1 September 2017, www.kkp.go.id, di akses tanggal 1 juli 2020.

Nur Aini, Sumber: Antara, Rabu 5 Oktober 2015, <https://republika.co.id/berita/oecl86382/menteri-susi-selidiki-kapal-penangkap-ikan-di-teluk-benoa> di akses tanggal 1 juli 2020.

Ahmad Ziaul Fitrahudin, “Menteri Susi Selidiki Transhipment Illegal Fishing di Wilayah ini”, <https://m.detik.com/news/berita/d-3286337> /, diakses tanggal 1 juli 2020.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Efri Yoni Bakoeni, 2014, *Patriot Negara Kepulauan*, Pandu Aksara Publishing, Jakarta.

Syamsumar Dam, 2010, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta

Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing: Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Syafrinaldi, 2009, *Hukum Laut International*, UIR Press, Pekanbaru

Marheni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan International*, Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI, Jakarta

Victor P.H. Nikijuw, 2008, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Illegal*, Cidesindo, Universitas Michigan

Amir Ilyas, 2012, *Asas Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta

Dikdik Mohammad Sodik, 2011, *Hukum Laut International dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Jawa Barat